

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar  
Volume 2, Nomor 5, February 2025, Halaman 12-18  
Licenced by CC BY-SA 4.0  
ISSN: 2302-6219  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15308018>

## Transparansi Keuangan Daerah: Mengapa Etika Akuntansi Penting?

Ayu Ning Tiyas Sulistiowati<sup>1</sup>, Syasi Tri Anisa<sup>2</sup>, Asmitiya Meilinda<sup>3</sup>, Dwi Novaria Misidawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Korespondensi Email: [asmitiya.meilinda@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:asmitiya.meilinda@mhs.uingusdur.ac.id)

### Abstract

*This study aims to analyze the importance of accounting ethics in supporting financial transparency in local government, as well as its impact on accountability and the quality of financial reporting. Using a descriptive qualitative approach and literature review as the basis of analysis, this research examines the role of accounting ethical principles—such as integrity, objectivity, and professionalism—in promoting the disclosure of financial information to the public. The findings indicate that consistent application of accounting ethics strengthens transparency, which in turn enhances public accountability and improves the quality of financial statements prepared in accordance with applicable standards. However, the study also identifies significant challenges in implementation, including potential conflicts of interest, practices of corruption, collusion, and nepotism (CCN), as well as weak organizational culture regarding ethics. Therefore, strengthening ethical values in public accounting practices is essential to building a transparent, accountable, and integrity-based local financial management system.*

**Keywords:** Accounting Ethics, Financial Transparency, Local Government Finance, Accountability, Financial Reporting Quality, Public Sector Ethics, Integrity, Objectivity, Professionalism

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya etika akuntansi dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah, serta dampaknya terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur sebagai dasar analisis, penelitian ini mengkaji peran prinsip-prinsip etika akuntansi—seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme—dalam mendorong keterbukaan informasi keuangan yang disampaikan kepada publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan etika akuntansi yang konsisten dapat memperkuat transparansi, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas publik dan mutu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan signifikan dalam implementasinya, termasuk potensi konflik kepentingan, praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta lemahnya budaya organisasi terhadap etika. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai etis dalam praktik akuntansi publik menjadi krusial untuk menciptakan sistem keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

**Kata Kunci:** Etika Akuntansi, Transparansi Keuangan, Keuangan Daerah, Akuntabilitas, Kualitas Laporan Keuangan, Etika Sektor Publik, Integritas, Objektivitas, Profesionalisme

### Article Info

Received date: 27 March 2025

Revised date: 30 March 2025

Accepted date: 15 April 2025

## PENDAHULUAN

Aspek kunci dari pemerintahan yang baik atau tata kelola yang baik dan manajemen keuangan publik adalah transparansi keuangan daerah (Pratiwi et al., 2024). Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang besar untuk mengelola sumber daya daerah maupun anggaran yang diperoleh dari publik. Oleh sebab itu, keterbukaan mengenai laporan keuangan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dikelola dengan efektif, efisiensi, dan akuntabel informasi. Transparansi dalam pengelola keuangan tidak hanya mempromosikan pengawasan publik, tetapi juga menciptakan kepercayaan publik pada pemerintah daerah sebagai penyedia layanan publik.

Faktanya, transparansi ini tidak dapat dipisahkan oleh aspek etika. Etika akuntansi memainkan peran penting sebagai fondasi moral yang memandu tindakan pemilik buku dan manajer keuangan dalam menyajikan informasi yang jujur, obyektif, dan andal. Prinsip-prinsip etika akuntansi tidak hanya merujuk pada kepatuhan dengan standar dan peraturan, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar yang memprioritaskan integritas, integritas dan objektivitas dalam praktik

akuntansi. Transparansi tidak ada artinya bila tanpa adanya prinsip etika yang kuat sehingga dapat mengurangi efektivitas akuntabilitas derajat yang dihasilkan.

Ketika informasi keuangan disajikan dengan jelas dan terbuka, publik dapat dengan mudah mengakses dan memahami bagaimana dana publik dikelola oleh pemerintah daerah (Gurendrawati, Etty, 2024). Hal ini tidak hanya mendorong partisipasi pemerintah daerah dalam pengawasan, tetapi juga mendorong pemerintah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua keputusan yang dibuat. Tingkat transparansi dan akurasi mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai perangkat untuk membuat keputusan yang lebih baik. Faktor-faktor seperti tekanan politik, kurangnya pemahaman tentang etika, dan kurangnya budaya organisasi yang tidak mendukungnya dapat menghalangi penerapan prinsip-prinsip etika dalam praktik akuntansi. Selain itu, pengembangan teknologi juga merujuk pada tantangan baru dalam pengimplementasi praktik etika.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara transparansi keuangan daerah dan peran etika dalam praktik akuntansi. Dengan memeriksa konsep etika akuntansi dan dampaknya pada akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan tahunan daerah, etika diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan pemerintah keuangan publik. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif beberapa isu utama, yaitu: (1) peran etika akuntansi dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah, (2) dampak transparansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan, serta (3) tantangan dalam penerapan etika akuntansi untuk mewujudkan transparansi keuangan daerah. Penelitian ini akan mencakup teori-teori etika akuntansi, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam transparansi penerapan, serta penerapan etika terhadap kualitas laporan keuangan.

Analisis yang mendalam diharapkan dapat membuat penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan teori dan praktik akuntansi, terutama dalam konteks pemerintah daerah. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan menjadi referensi kepada pembuat keputusan politik, akuntan dan kelompok kepentingan lainnya untuk meningkatkan transparansi keuangan dan akuntabilitas daerah.

## LANDASAN TEORI

Akuntabilitas merupakan konsep penting dalam administrasi publik yang berkaitan dengan kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas tindakan dan kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal organisasi publik. Secara umum, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menjawab dan menjelaskan pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam (Akuntabilitas, 2000) menyebutkan bahwa Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau organisasi untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil kepada pihak yang berwenang atau publik. Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas berarti pimpinan instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan amanatnya kepada masyarakat sebagai pemberi mandat. Akuntabilitas organisasi publik dapat diukur melalui beberapa dimensi penting seperti transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat (Wicaksono, 2015). Akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen kontrol dalam pelayanan publik untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan penggunaan sumber daya dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan adanya akuntabilitas, organisasi publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan (Maolani, 2023).

Transparansi adalah konsep yang memiliki banyak dimensi, meliputi prinsip dan praktik yang memberikan kesempatan bagi pihak internal dan eksternal untuk mengakses informasi yang tepat mengenai aktivitas suatu organisasi (Sitepu, Andres Putranta, 2022). Ide ini tidak hanya terbatas pada pengungkapan data, tetapi juga mencakup elemen perilaku yang melibatkan distribusi informasi secara aktif dan kesediaan organisasi untuk terbuka dalam operasinya.

Dalam ranah keuangan daerah, transparansi menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya pemerintah. Transparansi dan etika dalam akuntansi memiliki hubungan yang saling memperkuat dalam pengelolaan keuangan daerah. Praktik akuntansi yang menjunjung tinggi etika menjamin bahwa laporan keuangan akurat dan tidak terpengaruh oleh bias, sehingga menciptakan transparansi yang memungkinkan pemangku kepentingan untuk memeriksa validitas informasi keuangan tersebut.

Kombinasi ini membentuk sistem yang mampu mencegah penyimpangan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Transparansi memiliki peran krusial dalam mencapai tata kelola yang baik dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Ketika dipadukan dengan praktik akuntansi yang etis, transparansi mendukung terciptanya lingkungan yang mendorong keputusan yang bertanggung jawab dan pemanfaatan sumber daya publik yang efisien. Ini pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik dan efektivitas pemerintah daerah.

Etika profesi akuntansi merupakan aspek yang membahas prinsip-prinsip etis yang berkaitan dengan pekerjaan di bidang akuntansi. Untuk menjalankan etika ini, seorang akuntan perlu memiliki pengetahuan khusus dalam profesinya (Mafazah, 2022). Proses akuntansi diawali dengan pencatatan, pengelompokan, pengolahan, penyajian, hingga penyajian seluruh transaksi keuangan (Fitriyanti & Suprihandari, 2022). Inti dari akuntansi keuangan adalah mengelola informasi dan menyusun laporan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak internal maupun eksternal. Etika profesi akuntansi membahas tentang tindakan yang dianggap baik atau buruk yang perlu dilakukan seorang akuntan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Kode Etik dari Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan pedoman etika yang wajib diikuti akuntan dalam melaksanakan tugas-tugas profesional mereka (Hermanto, 2021).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Analisis data dilakukan berdasarkan berbagai referensi literatur, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, serta dokumen peraturan yang relevan. Tujuan penerapan metode kualitatif dalam penulisan ini adalah untuk mengkaji artikel secara mendalam, menyeluruh, dan komprehensif, sehingga mampu mengungkap realitas empiris di balik fenomena yang diteliti. Fokus utama penelitian ini terletak pada proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data (Marshanda et al., 2024). Pendekatan ini digunakan karena menitikberatkan pada pemahaman terhadap dimensi etika dalam praktik akuntansi. Metode kualitatif bertujuan untuk mengungkap fenomena sosial atau kemanusiaan dengan menyajikan gambaran secara utuh dan mendalam melalui narasi, yang merefleksikan perspektif para informan dalam lingkungan atau konteks alaminya (Nurhikmah & Sisdiyanto, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Etika Akuntansi Dalam Mendukung Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Etika akuntansi adalah sebuah prinsip moral dan standar perilaku yang memberi petunjuk atau mengarahkan kepada para akuntan untuk mengamban dan melaksanakan tugasnya dengan objektif, jujur, dan profesional. Etika akuntansi memiliki peran yang begitu penting dalam membentuk transparansi pengelolaan daerah. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik meliputi kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk memperoleh dan menciptakan penyajian laporan keuangan yang jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan tersebut, penerapan prinsip akuntansi yang kuat dan stabil harus menjadi landasan utama dalam pengimplementasian tugas akuntansi dengan baik, terutama pada sektor publik yang mempunyai tingkat pengawasan dan akuntabilitas yang tinggi.

Umumnya, etika akuntansi mengarahkan perilaku akuntan dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya guna memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan memberikan gambaran keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya rekayasa ataupun manipulasi. Etika akuntansi tidak hanya sekedar mematuhi regulasi atau aturan yang ada saja, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, objektivitas, transparansi, dan profesionalisme pada setiap tahap proses akuntansi

Etika akuntansi tidak sekedar mematuhi aturan atau regulasi yang ada saja, tetapi juga melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas, objektivitas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tahap proses akuntansi (Wiyanto et al., 2025). Dalam hal ini penerapan etika yang kuat dapat memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam catatan dan pelaporan keuangan, dimana hal tersebut merupakan langkah awal untuk menciptakan adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk berbagai program dan proyek dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak disalahgunakan. Dalam

konteks ini, etika akuntansi memainkan peran penting dalam menurunkan risiko penyalahgunaan wewenang atau korupsi yang sangat mungkin terjadi akibat pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Seorang akuntan publik yang beretika akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada publik menggambarkan atau menyatakan keadaan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi angka atau penghilangan informasi yang dapat merugikan masyarakat.

Pada penelitiannya (Firmansyah, 2008) mengungkapkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan dengan berlandaskan etika yang kuat berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengimplementasian etika yang baik dalam penyusunan laporan keuangan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas transparansi dan mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara. Tanpa adanya etika yang kuat, laporan keuangan daerah dapat menjadi alat untuk menutupi penyalahgunaan dana, yang akhirnya bisa menurunkan dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Implementasi etika akuntansi yang menitikberatkan pada integritas dan objektivitas juga berfungsi untuk menciptakan pengawasan yang lebih baik. Akuntan yang menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi etika profesional tidak hanya bertanggung jawab atas angka-angka yang akuntan tersebut laporkan, tetapi juga pada kejelasan dan keterbukaan informasi yang diberitahukan kepada publik atau masyarakat. Selain itu, etika akuntansi yang diimplementasikan secara konsisten dalam setiap proses akuntansi juga memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam batasan yang sesuai dengan regulasi atau peraturan dan hukum yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi yang lebih besar, etika akuntansi juga memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan sistem pengendalian internal di pemerintah daerah. Pengendalian internal yang baik, yang didasarkan pada nilai-nilai etika, membantu memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan dengan efisien dan akurat. Hal ini tidak hanya menurunkan risiko kecurangan, akan tetapi juga memastikan bahwa informasi keuangan yang diberitahukan atau disampaikan kepada publik dapat diterima dengan penuh kepercayaan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks ini, (Sari et al., 2020) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penerapan etika akuntansi dalam sistem pengendalian internal sangat mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengendalian internal yang berbasis etika dalam menciptakan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dengan sistem pengendalian internal yang baik, potensi penyalahgunaan dana dapat diminimalisasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Lebih jauh lagi, (Dharmawangsa, 2024) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan etika akuntansi dalam sektor publik berperan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang pada gilirannya memperbaiki kinerja instansi pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi publik. Etika akuntansi memberikan arah dan pedoman yang jelas bagi akuntan publik dalam menghadapi dilema-dilema etis yang mungkin muncul dalam tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan penyajian laporan keuangan.

Pengaruh etika akuntansi terhadap transparansi juga dapat dilihat dari peningkatan kualitas laporan keuangan yang diaudit oleh auditor eksternal. Audit yang dilakukan dengan dasar etika yang kuat akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, dalam laporan tahunan yang disusun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sering kali ditemukan rekomendasi terkait perbaikan dalam aspek pengelolaan keuangan berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip etika dalam akuntansi. Laporan BPK yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar transparansi yang diharapkan.

Dengan demikian, etika akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional, tetapi juga sebagai alat yang efektif dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih baik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Etika akuntansi yang dijalankan dengan baik dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, memperbaiki tata kelola keuangan, dan mencegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan negara.

### **Dampak Transparansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Dan Kualitas Laporan Keuangan**

Dampak transparansi keuangan daerah pada akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan tahunan adalah aspek penting dari tata kelola daerah yang baik. Transparansi keuangan daerah mengacu pada keterbukaan pemerintah daerah dalam memberikan informasi keuangan yang lengkap, lebih akurat dan dapat diakses (Ulya & Astuti, 2020). Keterbukaan ini memungkinkan kota dan pemangku kepentingan untuk memantau dan menilai penggunaan anggaran daerah, yang mendorong akuntabilitas yang lebih besar dalam mengelola keuangan daerah mereka (Masitha & Mulyadi, 2024).

Transparansi keuangan daerah memainkan peran kunci dalam menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara terbuka tentang anggaran dan realisasi pendanaan daerah. Oleh karena itu, ada peluang untuk memperbaiki kesalahan manajemen anggaran dan penyimpangan. Ini tidak hanya mengurangi kemungkinan konflik dan kontroversi anggaran, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Astuti et al., 2024).

Kewajiban untuk menjelaskan dalam konteks keuangan daerah berarti bahwa pemerintah daerah harus secara terbuka dan jujur mempertimbangkan manajemen keuangan kepada pemerintah daerah. Transparansi adalah obat utama untuk mencapai akuntabilitas ini, karena komunitas bebas informasi tidak dapat menerapkan pengawasan yang efektif (Astuti et al., 2024). Akuntabilitas yang baik mendorong pemerintah daerah untuk lebih terlatih dan bertanggung jawab atas manajemen anggaran, yang mendorong mereka untuk meningkatkan total kinerja keuangan daerah (Ulya & Astuti, 2020).

Berkenaan dengan kualitas laporan keuangan tahunan, transparansi berkontribusi pada penciptaan laporan yang lebih akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Gelar transparan biasanya memenuhi standar akuntansi negara yang berlaku, membuatnya mudah bagi laporan pengguna untuk memahami informasi yang disajikan. Kualitas laporan keuangan tahunan ini penting untuk membantu pemerintah dan kelompok kepentingan lainnya dalam keputusan yang tepat.

Sebuah penelitian terhadap menunjukkan bahwa transparansi keuangan daerah memiliki dampak signifikan pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagai contoh, hasil penelitian di kota Tanjungpinang menunjukkan bahwa transparansi 40,2% berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja keuangan wilayah tersebut. Ini sebagian besar dipengaruhi oleh manajemen keuangan dan akuntabilitas pribadi. Ini menegaskan bahwa transparansi adalah faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen keuangan daerah (Astuti et al., 2024). Selanjutnya, transparansi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah. Akses terbuka ke informasi memungkinkan masyarakat untuk berperan dalam menilai dan mengendalikan penggunaan anggaran. Partisipasi masyarakat yang luas ini akan memperkuat kepercayaan publik pada pemerintah daerah dan menciptakan iklim pemerintah yang lebih bersih dan lebih responsif (Masitha & Mulyadi, 2024).

Namun, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan daerah tunduk pada berbagai hambatan, termasuk: Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan perangkat dan penggunaan sistem penagihan berdasarkan penagihan sangat penting untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang optimal dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas juga secara positif mempengaruhi kualitas derajat daerah. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas mendorong kesiapsiagaan yang lebih baik dari laporan keuangan tahunan yang lebih lengkap sesuai dengan standar akuntansi negara pada waktu yang lebih baik. Oleh karena itu, laporan keuangan daerah tidak hanya dokumen administratif, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan manajemen keuangan publik dan pengambilan keputusan database.

Secara keseluruhan, transparansi keuangan memiliki daerah dampak signifikan pada akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan tahunan. Transparansi memungkinkan pengungkapan informasi yang mempromosikan tanggung jawab pemerintah daerah kepada publik, dan pada saat yang sama meningkatkan kualitas laporan keuangan tahunan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan penerapan transparansi dan akuntabilitas mereka untuk meningkatkan pemerintah keuangan mereka, meningkatkan kinerja keuangan, dan membangun kepercayaan di antara masyarakat yang lebih besar.

### **Tantangan Penerapan Etika Akuntansi dalam Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah**

Penerapan etika akuntansi dalam mewujudkan transparansi keuangan daerah merupakan aspek yang sangat krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Etika akuntansi

menjadi pondasi moral dan profesional yang mengarahkan perilaku para pelaku akuntansi, khususnya yang bekerja dalam sektor publik. Dalam konteks pemerintahan daerah, penerapan etika ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik korupsi atau penyalahgunaan anggaran. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Berikut ini adalah uraian naratif mengenai tantangan-tantangan tersebut secara panjang dan jelas:

1. **Budaya Birokrasi yang Tidak Etis**  
Salah satu tantangan utama adalah masih mengakarnya budaya birokrasi yang tidak sepenuhnya mendukung nilai-nilai etis. Dalam banyak kasus, praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi masih ditemukan dalam lingkungan pemerintahan daerah. Situasi ini menimbulkan tekanan terhadap profesional akuntansi untuk mengikuti arus budaya yang menyimpang dari prinsip etika. Seorang akuntan yang ingin menerapkan standar etika tinggi kerap menghadapi dilema antara mempertahankan integritas atau mengikuti instruksi atasan yang bertentangan dengan prinsip etis.
2. **Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Etika**  
Tantangan berikutnya adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang pentingnya etika akuntansi di kalangan pegawai pemerintahan daerah. Banyak aparatur sipil negara, termasuk mereka yang bekerja di bidang keuangan, belum sepenuhnya memahami konsekuensi etis dari tindakan mereka. Ini mencerminkan kurangnya pelatihan atau pendidikan berkelanjutan mengenai etika profesi akuntansi dalam lingkungan pemerintahan. Akibatnya, meskipun sistem dan regulasi sudah mendukung transparansi, pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut.
3. **Intervensi Politik dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan**  
Politik memiliki pengaruh besar dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah. Sayangnya, tidak jarang proses penganggaran dan pelaporan keuangan dipengaruhi oleh kepentingan politik, baik oleh kepala daerah maupun oleh legislatif daerah. Tekanan politik semacam ini dapat menghambat akuntan publik dalam menyusun laporan yang objektif dan jujur. Praktik manipulasi data untuk menyesuaikan dengan kepentingan politis sering terjadi, dan ini jelas melanggar prinsip etika akuntansi seperti integritas dan objektivitas.
4. **Keterbatasan Sumber Daya dan Teknologi**  
Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten serta kurangnya infrastruktur teknologi juga menjadi hambatan serius. Banyak daerah yang belum memiliki sistem informasi akuntansi yang memadai, sehingga proses pelaporan masih dilakukan secara manual, yang rawan kesalahan maupun manipulasi. Selain itu, keterbatasan jumlah akuntan profesional bersertifikat yang memahami etika secara menyeluruh juga menyebabkan proses pencatatan dan pelaporan keuangan tidak dilakukan dengan standar etis dan profesional yang tinggi.
5. **Tidak Efektifnya Pengawasan dan Penegakan Hukum**  
Lemahnya sistem pengawasan dan minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran etika turut memperbesar tantangan. Banyak kasus penyimpangan etika dalam laporan keuangan yang tidak ditindaklanjuti secara tegas. Ketika pelanggaran dibiarkan tanpa sanksi yang jelas, maka budaya tidak etis akan semakin menguat. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas internal daerah maupun oleh lembaga eksternal seperti BPK atau KPK sering kali mengalami keterbatasan dalam kapasitas dan independensi.

Secara keseluruhan, penerapan etika akuntansi dalam rangka mewujudkan transparansi keuangan daerah menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Budaya birokrasi yang permisif terhadap penyimpangan, minimnya kesadaran etis, intervensi politik, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, dan rendahnya partisipasi publik, semuanya menjadi faktor penghambat. Untuk mengatasinya, diperlukan komitmen kuat dari semua pihak—baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat luas—dalam membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan etika. Pelatihan etika secara berkelanjutan, penguatan lembaga pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis untuk menumbuhkan budaya etis dalam pengelolaan keuangan daerah.

## SIMPULAN

Etika akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung transparansi pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip dasar etika seperti integritas, objektivitas, dan profesionalisme menjadi landasan dalam penyusunan laporan keuangan yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi yang dibangun melalui penerapan etika akuntansi berkontribusi

besar dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah serta kualitas laporan keuangan tahunan. Namun demikian, terdapat berbagai tantangan yang menghambat penerapan etika tersebut, di antaranya budaya birokrasi yang tidak mendukung nilai-nilai etis, rendahnya pemahaman etika di kalangan aparatur, intervensi politik, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi, lemahnya pengawasan, serta minimnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah.

## REFERENSI

- Akuntabilitas, T. (2000). Teori Akuntabilitas. *Teori Akuntabilitas*, 1998, 10–55.
- Astuti, H., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). “Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Bpkad Pemerintah Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Kajian Pemerintah (Jkp)*, 10(1), 12.
- Dharmawangsa, U. (2024). *Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 2 Desember , 2024 | Issn : 2621 -3982 Pengaruh Akuntansi Sektor Publik Dalam Penerapan Jurnal Bisnis Net Volume : 7 No . 2 Desember , 2024 | Issn : 2621 -3982*. 2, 715–720.
- Firmansyah, I. (2008). *Peran Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Sakd) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Bagian .... November 2003*.
- Fitriyanti, & Suprihandari. (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan Dalam Standar Internasional. *Sinomika Journal*, 1(2), 119–126.
- Gurendrawati, Etty, Et Al. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Bumi Aksara.
- Hermanto, H. (2021). Etika Dalam Praktik Akuntansi Keuangan. *Jurnal Pendidikan, Sains Sosial, Dan Agama*, 7(1), 42–47.
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212.
- Maolani, D. Y. (2023). Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 3.
- Marshanda, S., Zikri, S. N., Pardede, C. S. C., Narendra, D., Hanoselina, Y., & Helmi, R. F. (2024). Analisis Peranan Etika Dalam Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, 02.
- Masitha, Z., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif Tentang Pengelolaan Anggaran Di Sulawesi Tenggara. *Ijma (Internsional Jurnal Of Management And Accounting*, 5(2), 226.
- Nurhikmah, A. H., & Sisdianto, E. (2024). Peran Akuntan Dalam Membangun Kepercayaan Publik Terhadap Laporan Keuangan: Perspektif Etika. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2.
- Pratiwi, R. I., Haliah, & Kusumawati, A. (2024). The Influence Of Transparency, Governance, And Financial Accountability In Managing Financial Reporting In The Public Sector. *International Journal Of Education And Life Sciences (Ijels)*, 2(10), 1165–1179.
- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.26486/Jramb.V6i1.697>
- Sitepu, Andres Putranta, And M. A. S. (2022). *Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (Cv. Azka Pustaka (Ed.); Cv. Azka P). Cv. Azka Pustaka.
- Ulya, C., & Astuti, E. B. (2020). Analisis Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kab Tegal, Bumd Kab Tegal, Ikatan Profesi Notariat Kab Tegal, Camat Dan Lurah Kab Tegal). *Akses: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 63–79. <https://doi.org/10.31942/Akses.V13i2.3242>
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jkap (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/Jkap.7523>
- Wiyanto, A., Agustiani, D., Zhilda, K. A., Sitohang, L. Y., Jl, A., & Raya, K. (2025). *Penerapan Kode Etik Profesi Akuntan Publik Dan Kasus-Kasus Pelanggaran Etika Profesi Akuntan Publik Implementation Of The Code Of Ethics For Public Accountants And Cases Of Violations Of The Code Of Ethics For Public Accountants Universitas Bina Sarana In*. 4.